

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk melihat latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom dapat ditinjau dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

##### 4.1.1 Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Sebelum Indonesia terbentuk menjadi sebuah Negara berdirilah beberapa kerajaan, seperti kerajaan keritang yang didirikan sekitar awal abad ke-6 yang berlokasi di wilayah kecamatan Keritang Sekarang ini seni budaya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur bangunan istana Puri Tujuh Sayang Kedatung Gunung Tujuh. Kemudian kerajaan kemuning yang didirikan oleh Raja Singapura 5 yang bergelar Raja Sambu, Diperkirakan berlokasi pada Desa Kemuning Muda sekarang ini. Bukti peninggalannya pada salah seorang keturunannya yang berada didesa tersebut berupa selembar besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.

Pada hakekatnya Kerajaan Indragiri menggantikan Kerajaan Keritang yang sudah ada sejak tahun 1298 M. Raja Indragiri yang pertama adalah Raja Merlang I, sampai hayatnya tak pernah menetap di Indragiri ia wafat di Malaka. Begitu juga seterusnya Raja Indragiri ke-2 dan ke-3 yang masing-masing bernama Raja Merlang II, ketiga-tiganya menetap di Malaka. Hanya sekali kali saja ia datang ke Indragiri,

sedangkan urusan-urusan kerajaan sehari-hari praktis dilakukan oleh patih Indragiri atau Perdana menteri.

#### 4.1.2 Masa Pejabat Belanda

Dengan adanya Traktat Van en Vrindshaap (perjanjian perdamaian dan persahabatan) pada tanggal 27 September 1838 antara kerajaan Indragiri Hilir menjadi Zelfbestur di bawah sultan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ditempatkan seorang Controlleur yang membawahi enam daerah ke Amiran yaitu:

- a. Amir Tembilahan di Tembilahan
- b. Amir Batang Tuaka di Sungai Luar
- c. Amir Tempuling di Sungai Salak
- d. Amir Mandah dan Gaung di Khairiah Mandah
- e. Amir Enok di Enok
- f. Amir Reth di Kota Baru.

Controlleur bertugas mencakup semua jabatan dan juga menjadi Hakim pada pengadilan diwilayahnya, sedemikian luasnya tugas dari controlleur sehingga Kerajaan Indragiri makin lama makin sempit. Hal tersebut terus berlangsung sampai masuknya bala tentara Jepang tahun 1942. Menyebabkan Kerajaan Indragiri harus menghadapi bala tentara Jepang yang masuk Kekerajaan Indragiri.

#### 4.1.3 Masa Penduduk Jepang

Pada zaman kedudukan Jepang Inhil di Kepalai oleh Seorang Gun Cho yang berkedudukan di Tembilahan dan membawa 5 (lima) Ku-Cho yaitu :

- a. Ku Sungai Luar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ku-Cho Tembilahan /Tempuling di Tembilahan
- c. Ku- Cho Enok
- d. Ku-Cho Reth
- e. Ku-Cho Mandah.

#### **4.1.4 Periode Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia**

Pada tanggal 13 September 1945, pada jam 10.00 di depan Kantor Gun-Cho di Tembilahan dengan disaksikan oleh ribuan rakyat, Bendera Merah Putih dikibarkan untuk pertama kalinya secara resmi setelah kemerdekaan Indonesia Di Proklamasikan (di tandai dengan sebuah tugu peringatan), setelah penyerahan kedaulatan RI (Desember 1945) Indragiri (Hulu dan Hilir) merupakan satu Kabupaten. Kabupaten Indragiri terdiri 3 (tiga) Kewedanaan, yaitu :

- a. Kewedanaan Kuantan Singingi,dengan Ibu Kota Tlk Kuantan
- b. Kewedanaan Indragiri Hilir , dengan Ibu kota Tembilahan
- c. Kewedanaan Indragiri Hulu, dengan Ibu Kota Rengat

Sedangkan Kewedanaan yang pertama di Inhil (Pada masa agresi I & II tercatat Amal Lako Sultan) Kewedanaan Indragiri Hilir membawa 6 Wilayah yaitu:

- a. Wilayah Tempuling Tembilahan
- b. Wilayah Enok
- c. Wilayah Gaung Anak Serka
- d. Wilayah Mandah Kateman
- e. Wilayah Kuala Indragiri
- f. Wilayah Reth.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan tata pemerintah selanjutnya menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi dua kewedanaan masing-masing :

1. Kewedanaan Inhil Utara meliputi Kecamatan :
  - a. Kecamatan Tempuling
  - b. Kecamatan Tembilahan
  - c. Kecamatan GAS
  - d. Kecamatan Mandah
  - e. Kecamatan Indragiri Hilir
2. Kewedanaan Inhil Selatan meliputi Kecamatan :

Kecamatan Enok dan Reteh yang berpusat di Kuala Enok. Merasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (Otonom).

Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Kondisi Umum Kelurahan Metro Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

Pada dasarnya pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah

Alasan ingin di lakukannya Pemekaran Kelurahan Pulau Kijang adalah karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Pulau Kijang, secara otomatis juga turut semakin meningkatkan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kelurahan Pulau Kijang dianggap sudah tidak efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan, yaitu seperti lamanya rentang waktu penyelesaian dalam pengurusan suatu pelayanan administrasi, pembangunan yang berjalan lambat, serta urusan pembinaan untuk kemasyarakatan yang menjadi kurang fokus, sehingga Pemekaran kelurahan dianggap sebagai salah satu kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik dan dengan dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, mempercepat pelayanan dan pemerataan pembangunan kepada masyarakat. Pada tahun 2007 para tokoh masyarakat membentuk tim pemekaran Kelurahan Metro. Tim pemekaran Kelurahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pada tahun 2011 resmi memekarkan diri dari Kelurahan Pulau Kijang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.

**a. Geografis**

Kelurahan metro merupakan salah satu dari tiga kelurahan dalam wilayah Kecamatan Reteh, kelurahan metro sendiri merupakan hasil pemekaran dari kelurahan pulau kijang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011. Jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan menggunakan kendaraan bermotor sekitar 40 menit.

Kelurahan metro yang berbatasan langsung dengan kelurahan pulau kijang yang mempunyai luas wilayah 8,75 KM, Sebagaimana kelurahan-kelurahan lainnya di wilayah Republik Indonesia. Kelurahan Metro Kecamatan Reteh mempunyai iklim penghujan dan iklim kemarau. Kedua kondisi iklim tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat yang mayoritas adalah petani dan perkebun.

**b. Penduduk**

Kelurahan metro mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.067 jiwa dan 540 Kepala Keluarga (KK), yang tersebar di 4 wilayah Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Kelurahan Metro Kecamatan Reteh Kabupaten**

**Indragiri Hilir**

No	Jumlah KK	Jenis kel laki-laki	Jenis kel perempuan	Jumlah penduduk	Jumlah RT	Jumlah RW	Ket
1	540	990	1.077	2.067	11	4	-

*Sumber: kantor kelurahan metro tahun 2016*

Berdasarkan table diatas jumlah penduduk yang berada di Kelurahan Metro sangat tinggi, terlihat bahwa ada sekitar 2.067 penduduk dan penduduk di Kelurahan Metro sendiri mayoritas penduduknya adalah perempuan.

### c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana

#### 1. Sarana dan prasarana pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya.

**Tabel 4.2: Jumlah Sekolah Kelurahan Metro Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Jenis pendidikan	Milik pemerintah	Milik swasta	Jumlah sekolah	Ket
1	Play grup	✓	-	1	-
2	TK	✓	-	1	-
3	SD/ sederajat	✓	-	2	Terakreditasi
4	SMP/ sederajat	✓	-	1	Terakreditasi
5	SMA/ sederajat	✓	-	1	Terakreditasi

Sumber: kantor kelurahan metro tahun 2016

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Metro sudah memadai. Hal tersebut dapat kita lihat dengan jumlah sekolah yang berjenjang dari PAUD hingga SMA dan tentunya akan berdampak positif bagi generasi penerus bangsa.

### 2. Sarana dan prasarana peribadatan

Sebagai kelurahan memiliki penduduk yang memeluk dan beribadat beberapa macam agama, untuk itu sarana peribadatan juga terdapat beberapa macam yang dapat kita temui. Sarana peribadatan yang di inventarisasi meliputi Masjid, Musholla, dan Langga. Banyaknya sarana ibadah di suatu wilayah menunjukkan tingkat pembangunan pada bidang mental spiritual berjalan dengan baik. Adapun beberapa tempat peribadatan yang ada di Kelurahan Metro dapat kita lihat sebagai berikut:

**Table 4.3: Sarana prasarana peribadatan Masyarakat Kelurahan Metro Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Jenis peribadatan	Jumlah	Ket
1	Masjid	3	-
2	Langgar	1	-
3	Mushola/surau	5	-
4	Gereja	-	-

*Sumber: kantor kelurahan metro tahun 2016*

Dari table diatas pembangunan sarana dan prasarana di bidang keagamaan cukup memadai, melihat jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam tentunya akan menunjang proses kegiatan beribadah untuk memperkuat ke imanan.

### 3. Sarana dan prasarana kesehatan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan, dan persalinan

**Table 4.4: Sarana prasarana kesehatan Masyarakat Kelurahan Metro**

**Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Unit kesehatan	Jumlah	Ket
1	Posyandu	3	-
2	Puskesmas	-	-
3	Klinik	-	-
4	RSUD	-	-
5	Tempat bersalin/bidan	3	-

*Sumber: kantor kelurahan metro tahun 2016*

Berdasarkan table diatas jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Metro tentunya masih sangat minim, masih kurangnya unit kesehatan dan keadaan tersebut tidak selaras dengan jumlah penduduk yang relative tinggi. Tentunya ketika masyarakat membutuhkan pertolongan pertama pada saat sakit harus menuju ke ibukota kecamatan yang jarak tempuhnya yang memakan waktu yang cukup lama.